

**ANALISA ECONOMIC BASE TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DAERAH TINGKAT II WONOGIRI :  
MENGHADAPI IMPLEMENTASI UU NO. 22/1999  
DAN UU NO. 5/1999**

Suyatno

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Abstract**

*This research aims at determining the sectors, which have regional superiority in Wonogiri, as the consequence of the implementation of Regulation 22/1999 and 25/1999. Furthermore, it also finds out determinant factors, which cause positioning, and repositioning these sectors.*

*LQ (Location Quotion) and DLQ (Dynamic Location Quotion) are used to determine superior sectors, and to identify determinant factors causing positioning and repositioning superior sectors, SSA (Shift Share Analysis) is used on this research.*

*The result of this research indicates that statically, superior sectors in Wonogiri are: Agriculture; transport and communication ; Services; and Financial, ownership and business services. The sectors which are hoped to become superior in the next time are: Financial, ownership and business services; Agriculture; and Services. Positioning and repositioning superior sectors in Wonogiri are caused by Location superiority.*

**Keywords:** *Location Quotion, Dynamic Location Quotion, Shift Share Analysis and Location Superiority*

**PENDAHULUAN**

Pada akhir-akhir ini Otonomi Daerah menarik perhatian dan menjadi diskusi yang meluas dikalangan masyarakat. Ditetapkannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 adalah sebagai pengganti dari UU No. 5/1974 yang telah terbukti memiliki kelemahan mendasar.

Candra Fajri Ananda (1999) mengemukakan bahwa UU No. 5/1974 lebih banyak menitikberatkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik ketimbang desentralistik, pemerintah yang sentralistik ini terselubung melalui pelaksanaan dekonsentrasi. Karena memang dekonsentrasi ini merupakan penghalusan daripada sentralisasi, dan merupakan sarana yang paling ampuh bagi seperangkat birokrasi untuk menjalankan praktek sentralisasi, yang mengakibatkan daerah selalu tergantung dari pusat, yang pada gilirannya perwujudan kemandirian daerah selalu terhambat.

Dengan bergulirnya era reformasi, dikeluarkannya Undang-Undang No. 22/1999 dan Undang-Undang No. 25/1999 diharapkan mampu membawa nuansa dan paradigma baru yang jauh dari UU sebelumnya. Daerah tidak lagi sebagai komponen desentralisasi administrasi dan otonomi birokrasi, tetapi sudah diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, di mana Undang-Undang ini mampu memberikan warna yang jelas dan lebih menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran-peran masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Secara politis Undang-Undang No. 22/1999 dan Undang-Undang No. 25/1999 merupakan pembalikan sistem sentralistik dan merupakan koreksi model perencanaan pembangunan tradisional Top down yang implikasinya menuntut kemandirian daerah (Agustaf, 1999). Orientasi terhadap kebijaksanaan otonomi daerah menjadi suatu kekuatan bagi daerah yang sangat memungkinkan daerah untuk melakukan optimalisasi semua resources-nya.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999 tersebut di atas, Daerah Tingkat II dalam hal ini perlu jeli dalam memberdayakan potensi alam setempat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka meningkatkan hasil daerah. Selain itu, perlu juga upaya agar setiap Daerah Tingkat II memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan Daerah Tingkat II yang lain. Antisipasi yang perlu dilakukan adalah menentukan sektor apa pada Daerah Tingkat II ini yang menjadi sektor bisnis (unggulan) dibandingkan dengan DATI II yang lain. Dengan demikian, maka pembangunan dapat diarahkan pada pengembangan dan pembinaan keunggulan tersebut di masa mendatang.

## ECONOMIC BASE THEORY

Teori ini dikemukakan oleh Harry W Richardson yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya-sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kelayakan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*).

Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

Masalah kini adalah daerah mana yang akan digunakan sebagai pembanding? Sektor X pada daerah A barangkali kalah bersaing dengan daerah B, tetapi bisa saja menang dengan daerah C. Untuk mengatasi masalah ini, maka digunakan daerah himpunan sebagai pembanding. Misalnya Kabupaten Wonogiri dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah sebagai wakil dari rata-rata seluruh Daerah Tingkat II yang ada di Propinsi Jawa Tengah (daerah himpunan). Jika pangsa sektor di suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pangsa di seluruh daerah bagian yang tergabung dalam daerah himpunan, maka dapat disimpulkan bahwa sektor daerah tersebut unggul dibandingkan umumnya daerah bagian yang lain, dan sebaliknya.

Rumusan perbandingan antar pangsa suatu sektor pada suatu daerah dengan pangsa sektor tersebut dengan daerah himpunan, disebut *Location Quotion (LQ)* dengan formulasi sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_{in}/Y_n}{X_i/Y}$$

Dengan  $X_{in}$  adalah nilai tambah sektor ( i ) di daerah ( n ),  $X_i$  adalah nilai tambah sektor ( i ) di daerah himpunan,  $Y_n$  adalah PDRB daerah ( n ), dan  $Y$  adalah PDRB daerah himpunan. Misalnya mencari indeks LQ sektor listrik dan air bersih untuk Wonogiri pada tahun 1993, di mana didapat nilai tambah sektor listrik dan air bersih

Wonogiri (  $X_{in}$  ) pada tahun 1993 sebesar 2.644,30 dan PDRB Wonogiri (  $Y_n$  ) sebesar 639.428,70, nilai tambah sektor pertanian di Jawa Tengah (  $X_i$  ) sebesar 228.414,71 dan PDRB Jawa Tengah (  $Y$  ) sebesar 33.978.899,16 sehingga LQ dari sektor listrik dan air bersih sebesar 0,62.

Nilai LQ mulai dari 0 dengan nilai 1 sebagai patokan karena nilai 1 menyatakan bahwa pangsa sektor di daerah bagian sama dengan pangsa sektor di daerah himpunan. Itu berarti kalau  $LQ < 1$ , berarti sektor tersebut bukanlah sektor unggulan bagi daerah, karena masih kalah dengan sektor itu di daerah lain dalam daerah himpunan-nya. Sebaliknya apabila  $LQ > 1$  berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan bagi daerah. Dalam contoh di atas sektor listrik dan air bersih bukan merupakan sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri.

Kelemahan LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu (Yuwono, 1999). Artinya, bahwa sektor basis (unggulan) tahun ini belum tentu akan menjadi sektor unggulan di waktu yang akan datang, sebaliknya sektor yang belum unggul pada saat ini mungkin akan unggul (menjadi sektor basis) di masa yang akan datang.

Untuk mengatasi kelemahan sehingga dapat diketahui perubahan atau reposisi sektoral digunakan varians dari LQ yang disebut Dynamic Location Quotion ( DLQ ), yaitu dengan mengintroduksikan laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak, dengan formulasi sebagai berikut:

$$LQ = \left\{ \frac{X_{ino}(1 + g_{in})^t / Y_{no}(1 + g_n)^t}{X_{io}(1 + G_i)^t / Y_o(1 + G)^t} \right\}$$

Dengan  $g_{in}$  adalah rata-rata laju pertumbuhan sektor (  $i$  ) di daerah (  $n$  ),  $G_i$  adalah rata-rata laju pertumbuhan sektor (  $i$  ) di daerah himpunan,  $g_n$  adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB di daerah (  $n$  ),

dan  $G$  adalah rata-rata pertumbuhan PDRB di daerah himpunan. Atau dengan asumsi bahwa pada awalnya  $X_{ino}/Y_{no} = X_{io}/Y_o$ , maka persamaan di atas dapat dimodifikasi sebagai berikut:

$$LQ = \left\{ \frac{(1 + g_{in})/(1 + g_n)}{(1 + G_i)/(1 + G)} \right\}^t$$

Misalnya untuk melihat posisi dan reposisi sektor pertanian dari PDRB DATI II Wonogiri dari tahun 1993 - 1998 didapat rata-rata laju pertumbuhan sektor pertanian Wonogiri ( $g_{in}$ ) sebesar 5,02%, rata-rata laju pertumbuhan sektor pertanian di daerah Jawa Tengah ( $G_i$ ) sebesar -0,09%, rata-rata laju pertumbuhan PDRB Wonogiri ( $g_n$ ) sebesar 3,13%, rata-rata laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah ( $G$ ) sebesar 2,45% dengan  $t = 5$  tahun, sehingga DLQ sektor pertanian sebesar 51733,33.

Tafsiran atas DLQ pada dasarnya masih sama dengan LQ, kecuali perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan dengan angka 1 sebagai patokan. Apabila  $DLQ < 1$ , berarti proporsi laju pertumbuhan sektor ( $I$ ) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah ( $n$ ) lebih rendah dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama pada PDRB daerah himpunan, dan sebaliknya.

## **FAKTOR PENENTU PERUBAHAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH**

Metode LQ maupun DLQ hanya menunjukkan posisi dan reposisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi daerah, tanpa membahas sebab perubahan tersebut. Pemahaman untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya reposisi sektoral adalah sangat penting karena merupakan kunci dasar untuk mengetahui kemampuan daerah untuk mempertahankan sektor unggulan dalam persaingan.

Untuk mengetahui perubahan sektor atau reposisi sektoral digunakan Analisis Shift Share dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Indeks Total Keuntungan Daerah (ITKD) sebagai selisih dari laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan pertumbuhan PDRB daerah himpunan yang mewakili rata-rata laju

pertumbuhan PDRB dari seluruh daerah bagian, yang diformulasikan sebagai berikut:

$$ITKD = (g_n - G)$$

Misalnya rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonogiri selama tahun 1993-1998 sebesar 3,13 pertahun dan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 2,45 pertahun, maka ITKD Kabupaten Wonogiri sebesar **0,67**.

2. Dari keunggulan daerah secara total di atas, kemudian dapat dihitung keuntungan yang diperoleh oleh daerah bagian jika dibandingkan daerah bagian mempunyai laju yang sama dengan daerah himpunan, yaitu dengan mengalikan ITKD dengan PDRB daerah bagian yang disebut *Total Shift Share*, dengan formulasi sebagai berikut:

$$TSS = (g_n - G)Y_{no}$$

Dari nilai ITKD Wonogiri sebesar 0,67 dapat dicari nilai TSS dengan mengalikan PDRB Wonogiri pada tahun awal sebesar 639.428,70 sehingga TSS Wonogiri sebesar **428.417,229**.

Artinya ITKD tersebut memberikan keuntungan sebesar 428.417,229 juta atau 0,43 milyar (dibulatkan).

Persamaan diatas (TSS) dapat diuraikan dengan memasukan  $g_n$  dan  $G_i$  dan ditambahkan untuk sektor tersebut menjadi:

$$TSS = \sum(g_n - g_{in})X_{ino} + \sum(G_i - G)X_{ino} + \sum(g_{in} - G_i)X_{ino}$$

Dengan  $\sum(G_i - G)X_{ino} - \sum(g_n - g_{in})X_{ino}$  adalah Structural Shift Share yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan daerah himpunan yang terjadi karena perbedaan pangsa sektoral kendati laju pertumbuhan sektoral tepat sama. Sedangkan  $\sum(g_{in} - G_i)X_{ino}$  adalah Location Shift Share yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB suatu daerah bagian dengan daerah himpunan yang terjadi karena

perbedaan laju pertumbuhan sektoral, kendati pangsa sektoral daerah bagian tepat sama (Wijayanto, 1999). Nilai 0 menyatakan bahwa pangsa sektoral daerah bagian tepat sama dengan daerah himpunan, dengan laju pertumbuhan sektoral yang tepat sama. Nilai positif atau negatif menunjukkan keuntungan yang dinikmati atau kerugian yang diderita daerah bagian atas keunggulan atau kelemahan struktur atau lokasi daerah terhadap daerah lain dalam daerah himpunan.

## **KASUS DATI II Wonogiri**

Daerah Tingkat II Wonogiri mempunyai sifat daerah dengan karakteristik yang didominasi sektor primer. Kondisi ekonomi dan perkembangannya dapat diamati dari PDRB 1997 atas dasar harga konstan 1993 sebesar Rp 778.762,77 juta, yang didominasi sektor primer sebesar 45,43% menyusul kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 13,92% dan sektor jasa-jasa yang terdiri dari pemerintahan dan swasta sebesar 13,62%.

Pada akhir tahun 1998 PDRB Wonogiri mengalami pertumbuhan negatif menjadi Rp 742.361,47 juta. Kondisi ini disebabkan karena perekonomian nasional terkena dampak krisis yang berakibat pada laju pertumbuhan ekonomi daerah Wonogiri.

Dalam tahun yang sama PDRB Jawa Tengah juga mengalami laju pertumbuhan negatif yang pada tahun 1997 sebesar Rp 43.129.820,90 juta pada akhir tahun 1998 menjadi sebesar Rp 37.793.149,49 juta.

Keunggulan Kabupaten Wonogiri dibandingkan dengan DATI II yang lain di Jawa Tengah dapat dibaca pada lampiran 2.

Dilihat dari nilai LQ statis, ada empat sektor yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi di DATI II Wonogiri, yang didominasi oleh sektor pertanian disusul kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi serta kemudian sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, persewaan dan jasa usaha, sementara lima sektor yang lain tidak dapat diunggulkan terhadap DATI II yang lain di Jawa Tengah.

Jika dilihat dari nilai DLQ (lihat lampiran 4), ada tiga sektor yang dapat diharapkan untuk unggul dikemudian hari, dalam hal ini sektor keuangan, persewaan, dan jasa-jasa (3.884.574,56) walaupun dilihat dari nilai LQ statis tahun 1998 sektor ini menempati urutan

terakhir dari sektor basis tahun 1998. Urutan kedua dari nilai DLQ adalah sektor pertanian (5.173,33) dan terakhir sektor jasa-jasa (222,97). Sehingga untuk sektor-sektor basis tahun 1998 belum mengalami reposisi dan dapat diharapkan untuk unggul dikemudian hari kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi.

Jika dilihat dari nilai TSS, DATI II Wonogiri telah diuntungkan sebesar 0,43 milyar dengan laju pertumbuhannya selama lima tahun itu dibandingkan jika bertumbuh sama dengan laju pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah. Keuntungan tersebut diperoleh dari sumbangan positif keunggulan lokasional.

Keunggulan lokasional tersebut terjadi karena:

- a. Wonogiri sebagian besar terdiri dari daerah pertanian dimana pada kondisi krisis, laju pertumbuhan sektor ini di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan negatif, tetapi di Wonogiri sektor ini tetap menunjukkan nilai laju pertumbuhan yang positif.
- b. Di Wonogiri terdapat beberapa objek pariwisata yang cukup terkenal terutama objek pariwisata Waduk Gajah Mungkur sehingga banyak penduduk yang datang ke daerah Wonogiri sehingga memberikan sumbangan terhadap sektor jasa-jasa, khususnya jasa hiburan dan rekreasi. Keunggulan lokasional di sektor ini juga berpengaruh pada sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa sehingga memberikan keuntungan bagi daerah.

## KESIMPULAN

Undang-Undang No. 22/1999 dan Undang-Undang No. 25/1999 sebagai suatu perwujudan demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan terlepas dari berbagai kelemahan yang terkandung dalam UU tersebut maka setiap Daerah Tingkat II perlu mempersiapkan potensi sumber daya yang ada untuk menghadapi implementasi kedua UU tersebut.

Dalam bidang perekonomian Daerah Tingkat II dalam hal ini perlu jeli dalam memberdayakan potensi alam setempat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan hasil daerah. Selain itu, perlu juga upaya agar setiap DATI II memiliki keunggulan tertentu (menjadi sektor basis) dibandingkan dengan DATI II yang lain.



Kondisi Daerah Tingkat II Wonogiri menunjukkan bahwa sektor unggulan sekarang ini kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi masih dapat dipertahankan untuk unggul di masa mendatang. Keunggulan DATI II Wonogiri terutama disebabkan oleh faktor lokasional. Namun, ada beberapa sektor yang memiliki keunggulan lokasional yang belum dimanfaatkan dengan baik yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor listrik dan air bersih.

Hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Wonogiri adalah dominasi beberapa sektor justru mengurangi kemanfaatan, sementara sektor dominan tidak memberikan keuntungan karena laju pertumbuhan sektor ini (dilihat dari nilai DLQ) lebih rendah dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di Jawa Tengah. Dengan demikian perlu diadakan kebijakan yang lebih memperhatikan pemberdayaan sektor-sektor yang secara dinamis unggul agar menjadi sektor unggulan yang dominan di kemudian hari. Di masa mendatang perlu disusun program yang lebih intensif agar sektor yang memiliki keunggulan lokasional ikut serta menikmati keunggulan yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Candra Fajri Ananda, 1999, *Rekonsiliasi Perekonomian Melalui Otonomi Daerah yang Luas*, Makalah, Diskusi Panel UNIBRAW, Malang.
- Edy Purwa Saputra, 1999, *Otonomi Daerah: Realitas dan Integritas Ekonomi*, Makalah, Seminar UMS, Surakarta.
- Harry W. Richardson, 1985, *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, LPFE UI, Jakarta.
- Lembaga Penelitian UMS, 1996, *Pedoman dan Tata Krama Dosen dalam Penelitian*.
- Lincoln Arsyad, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- M. Suparmoko, 1995, *Metode Penelitian Praktis*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Nasyith Majidi, 1997, *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*, *PRISMA No. 3*.

- Paul Sitohang, 1997, *Perencanaan Pembangunan Regional*, LPFE UI, Jakarta.
- Prpto Yuwono, 1999, Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 (Study Kasus DATI II Salatiga), *KRITIS*, Vol. XII No. 2.
- Sjahfrijal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, *PRISMA* No. 3

Lampiran 1

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT HARGA KONSTAN 1993 PROPINSI JAWA TENGAH  
MENURUT LAPANGAN USAHA, TAHUN 1993 - 1998 (Jutaan Rp)**

No	Lapangan Usaha	TAHUN						
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	
1	Pertanian	7.810.639,73	7.782.116,47	8.211.174,14	8.487.971,93	8.216.026,20	7.742.852,27	
2	Pertambangan dan Penggalian	407.614,43	432.941,70	471.646,19	527.557,05	587.426,67	545.662,76	
3	Industri Pengolahan	10.234.268,10	11.322.071,68	12.260.155,08	13.327.648,25	13.709.740,32	11.707.062,06	
4	Listrik dan Air bersih	228.414,71	264.697,78	304.154,62	346.833,47	393.556,61	407.879,93	
5	Bangunan	1.604.770,61	1.688.679,43	1.808.178,57	2.011.485,33	2.139.684,09	1.452.845,56	
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.802.655,77	7.580.716,93	8.337.892,12	9.034.329,60	9.612.930,14	8.732.103,53	
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.278.563,64	1.378.872,97	1.510.647,54	1.705.241,76	1.766.846,11	1.706.114,39	
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha	1.703.722,74	1.869.209,67	1.974.205,57	2.114.567,23	2.283.522,22	1.502.666,55	
9	Jasa-jasa	3.908.249,43	4.025.867,85	4.135.898,81	4.306.569,10	4.420.088,54	3.995.962,44	
	<b>PDRB</b>	<b>33.978.899,16</b>	<b>36.345.174,48</b>	<b>39.013.952,64</b>	<b>41.862.203,72</b>	<b>43.129.820,90</b>	<b>37.793.149,49</b>	

Sumber: BPS Jawa Tengah, 1998

Lampiran 2

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT HARGA KONSTAN 1993 KABUPATEN WONOGIRI  
MENURUT LAPANGAN USAHA, TAHUN 1993 - 1998 (Jutaan Rp)**

No	Lapangan Usaha	TAHUN					
		1993	1994	1995	1996	1997	1998
1	Pertanian	291.883,15	289.618,16	303.292,74	348.062,08	353.793,63	371.426,60
2	Pertambangan dan Penggalian	8.078,26	8.718,70	9.148,04	8.746,63	9.898,12	8.833,58
3	Industri Pengolahan	35.322,87	36.972,53	40.532,86	45.732,80	47.109,94	35.942,36
4	Listrik dan Air bersih	2.644,30	28.843,82	37.999,55	4.129,88	4.866,87	5.219,04
5	Bangunan	34.425,10	35.595,89	37.788,45	37.473,10	39.204,44	21.286,90
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	102.750,62	103.182,21	110.339,45	107.996,47	108.413,72	89.086,22
7	Pengangkutan dan Komunikasi	46.309,05	49.624,48	62.136,31	63.540,33	66.658,72	62.767,33
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha	29.975,52	34.219,26	37.225,49	39.176,55	42.722,49	37.748,37
9	Jasa-jasa	88.039,83	94.725,72	99.432,17	102.418,74	106.094,85	110.051,07
	<b>PDRB</b>	<b>639.428,70</b>	<b>655.541,34</b>	<b>703.695,45</b>	<b>757.276,58</b>	<b>778.762,78</b>	<b>742.361,47</b>

Sumber: BPS Kab. Wonogiri, 1999

Lampiran 3

**INDEKS LQ DATI II WONOGIRI TERHADAP PROPINSI JAWA TENGAH  
MENURUT LAPANGAN USAHA, TAHUN 1993 - 1998 (Jutaan Rp)**

No	Lapangan Usaha	INDEKS LQ TAHUN					
		1993	1994	1995	1996	1997	1998
1	Pertanian	1,99	2,06	2,05	2,27	2,38	2,44
2	Pertambangan dan Penggalian	1,05	1,12	1,08	0,92	0,93	0,82
3	Industri Pengolahan	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,16
4	Listrik dan Air bersih	0,62	6,04	6,93	0,66	0,68	0,65
5	Bangunan	1,14	1,17	1,16	1,03	1,01	0,75
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,80	0,75	0,73	0,66	0,62	0,52
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1,92	2,00	2,28	2,06	2,09	1,87
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha	0,93	1,01	1,05	1,02	1,04	1,28
9	Jasa-jasa	1,20	1,30	1,33	1,31	1,33	1,40
	<b>PDRB</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Data: Diolah

Lampiran 4

**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 PROPINSI JAWA TENGAH  
MENURUT LAPANGAN USAHA, TAHUN 1993 - 1998 (Jutaan Rp)**

No	Lapangan Usaha	LAJU PERTUMBUHAN PER TAHUN						
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	
1	Pertanian	-	-0,37	5,51	3,37	-3,20	-5,76	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	6,21	8,94	11,85	11,35	-7,11	
3	Industri Pengolahan	-	10,63	8,29	8,71	2,87	-14,61	
4	Listrik dan Air bersih	-	15,88	14,91	14,03	13,47	3,64	
5	Bangunan	-	5,23	7,08	11,24	6,37	-32,10	
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-	11,44	9,99	8,35	6,40	-9,16	
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-	7,85	9,56	12,88	3,61	-3,44	
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha	-	9,71	5,62	7,11	7,99	-34,20	
9	Jasa-jasa	-	3,01	2,73	4,13	2,64	-9,60	
	<b>PDRB</b>	-	<b>6,96</b>	<b>7,34</b>	<b>7,30</b>	<b>3,03</b>	<b>-12,37</b>	

Sumber: BPS Jawa Tengah, 1998

Lampiran 5

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 KABUPATEN WONOGIRI  
MENURUT LAPANGAN USAHA, TAHUN 1993 - 1998 (Jutaan Rp)

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan per Tahun						
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	
1	Pertanian	-	-0,77	9,01	10,25	1,65	4,98	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	8,31	1,14	10,13	1,55	-10,75	
3	Industri Pengolahan	-	4,70	5,61	17,03	3,01	-23,71	
4	Listrik dan Air bersih	-	8,52	28,71	11,81	17,85	7,24	
5	Bangunan	-	3,35	2,49	2,77	4,62	-45,70	
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-	0,39	3,14	1,51	0,39	-17,83	
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-	7,19	22,52	4,48	4,91	-5,84	
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha	-	14,21	4,85	9,14	9,05	-11,64	
9	Jasa-jasa	-	7,58	2,21	5,81	3,59	3,73	
	<b>PDRB</b>	-	<b>2,52</b>	<b>7,35</b>	<b>7,76</b>	<b>2,70</b>	<b>-4,67</b>	

Sumber: BPS Kab. Wonogiri, 1998

Lampiran 6

**RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PDRB, INDEKS DLQ DAN TSS PROPINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN WONOGIRI  
MENURUT LAPANGAN USAHA, TAHUN 1993 - 1998**

No	Lapangan Usaha (1)	RATA-RATA RATA-RATA		DLQ	SSA (Milyard Rp)		
		(G)	(g)		SSS	LSS	TSS
1	Pertanian	-0,09	5,02	5173,33	-1,29	1,49	0,20
2	Pertambangan dan Penggalian	6,25	2,08	0,01	0,04	-0,03	0,01
3	Industri Pengolahan	3,18	1,33	0,02	0,09	-0,07	0,02
4	Listrik dan Air bersih	12,39	14,83	0,94	0,00	0,01	0,00
5	Bangunan	-0,44	-6,49	-35694,40	0,23	-0,21	0,02
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,40	-2,48	0,00	0,88	-0,81	0,07
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6,09	6,65	0,60	0,01	0,03	0,03
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha	-0,75	5,12	3884574,56	-0,16	0,18	0,02
9	Jasa-jasa	0,58	4,58	222,97	-0,29	0,35	0,06
<b>PDRB</b>		<b>2,45</b>	<b>3,13</b>	<b>1,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,94</b>	<b>0,43</b>

Data: Diolah

G = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah  
g = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonogiri  
DLQ = Dynamic Location Quotion  
SSS = Structure Shift Share  
LSS = Location Shift Share  
TSS = Total Shift Share